LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN MODEL BISNIS KERAKYATAN: KELEMBAGAAN DAN SINKRONISASI KOPERASI DESA MERAH PUTIH DENGAN DAPUR UMUM DI WILAYAH DAS KALI LAMONG DAN AGROPOLITAN

2025

KERJASAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN MODEL BISNIS KERAKYATAN: KELEMBAGAAN DAN SINKRONISASI KOPERASI DESA MERAH PUTIH DENGAN DAPUR UMUM DI WILAYAH DAS KALI LAMONG DAN AGROPOLITAN

Tim Penyusun:

1. **Dr. Sukaris, S.E., M.S.M**
2. **Suwarno, SE., M.Si**
3. **Dr, Suwandi, S.E., M.A**
4. **Hernum Daya Wati., S.M., M.M**
5. **Dr. Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM., M.Kes**
6. **Endah Mulyani, SST., M.Kes**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2025

TIM PENYUSUN

1. Dr. Sukaris, S.E., M.S.M
2. Suwarno, SE., M.Si.
3. Dr. Suwandi., SE., M.A
4. Hernum Daya Wati, SM., M.M
5. Dr. Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM., M.Kes
6. Endah Mulyani, SST., M.Kes

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya Laporan Akhir Pengembangan Model Bisnis Kerakyatan: Kelembagaan Dan Sinkronisasi Koperasi Desa Merah Putih Dengan Dapur Umum Di wilayah Das Kali Lamong Dan Agropolitan.

Laporan Akhir ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program-program sesuai dengan panduan, dengan tersusunnya Laporan Akhir ini diharapkan pula dapat menjadi acuan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Selain itu Laporan Akhir ini juga sebagai masukan dan bahan penilaian Bupati Gresik terkait kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kesehatan agar dapat mewujudkan Gresik yang berdaya namun tetap sehat dan lestari.

Gresik, 12 Desember 2025
Ketua Tim,

Dr., Sukaris SE., M.S.M

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR i
TIM PENYUSUN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan 6
1.3 Penggunaan Personal 7
1.4 Pelaksanaan kegiatan 8
1.5 Mitigasi Risiko, Monitoring, dan Evaluasi 9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 14
KONSEP DASAR KOPERASI DESA MERAH PUTIH 14
2.1 Pengertian KDMP 14
2.2 Landasan Hukum KDMP 15
2.3 Kelembagaan KDMP 16
2.4 Tata Kelola dan Manajemen Koperasi 17
2.5 Model Bisnis dan Usaha KDMP 18
2.6 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Dampak Sosial 20
2.7 Tantangan dan Rekomendasi Pengembangan 21
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN 22
PENILAIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH 22
3.1 Aspek Program Layanan 22
3.2 Aspek Proses KDMP 25
3.3 Aspek Manajemen Organisasi 28
3.4 Aspek Sarana Prasarana 31
3.5 Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 35
3.6 Aspek Hasil KDMP 37
3.7 Dapur Umum (MBG) 40

3.8 Hasil Perbandingan Aspek Kelembagaan (KDMP) 46
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 49
4.1 Tabel Kesimpulan dan Peta Sinkronisasi KDMP-Dapur Umum (MBG) 49
4.2 Peta Sinkronisasi Model Bisnis KDMP dan Dapur Umum (MBG) 49
4.3 Rekomendasi Kebijakan Strategis 50
DAFTAR PUSTAKA 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Masalah, Sasaran, dan Spesifikasi Teknis 6
Tabel 2. Tujuan dan Instrumen Penelitian 7
Tabel 3. Penggunaan Personil 7
Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 9
Tabel 5. Mitigasi Resiko 10
Tabel 6. Tantangan dan Rekomendasi Pengembangan 21
Tabel 7. Aspek 1 : Aspek Program Layanan 22
Tabel 8. Aspek 2 : Aspek 2 Proses KDMP 25
Tabel 9. Aspek 3 : Aspek Manajemen Organisasi 28
Tabel 10. Aspek 4 : Aspek Sarana dan Prasarana 31
Tabel 11. Aspek 5 : Aspek Sumber Daya Manusia 35
Tabel 12. Hasil Penilaian Aspek 6 Hasil (Dampak) KDMP 37
Tabel 13. Tabel Reduksi Dapur Umum Jatirembe 40
Tabel 14. Tabel Reduksi Dapur Umum Kedamaian 41
Tabel 15. Tabel Penyajian Data 2 Dapur Umum 41
Tabel 16. Penarikan Tema 42
Tabel 17. Hasil Perbandingan Aspek Kelembagaan KDMP 46
Tabel 18. Kesimpulan & Peta Sinkronisasi KDMP-Dapur Umum 49
Tabel 19. Peta Sinkronisasi Model Bisnis KDMP dengan Dapur Umum 49
Tabel 20. Rekomendasi Kebijakan Strategis 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Kali Lamong dan kawasan Agropolitan menghadapi tantangan serius terkait kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Ketergantungan pada rantai pasok konvensional dan minimnya akses terhadap modal serta pemasaran produk lokal membuat sebagian besar warga masih sulit melepaskan diri dari kemiskinan dan fluktuasi harga hasil produksi. Di sisi lain, dapur umum yang dijalankan masyarakat sering terkendala dalam memastikan rantai pasok pangan yang berkelanjutan dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Transformasi ekonomi desa melalui koperasi sejatinya bertujuan memberdayakan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, terdapat masalah mendasar berupa belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan sinkronisasi aktivitas antara koperasi dengan dapur umum, sehingga inovasi dan manfaat ekonomi belum dapat dirasakan secara merata serta berkelanjutan. Hal ini diperparah oleh fragmentasi kelembagaan, akses permodalan yang terbatas, belum terintegrasinya sistem distribusi, dan rendahnya literasi digital pelaku usaha desa.

Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi secara masif di wilayah Lamongan dan Gerbangkertosusila sejak 2020 sebagai reaksi atas disparitas ekonomi antara kota dan desa serta tingginya fluktuasi harga produk lokal. Dalam perkembangannya, koperasi ini belum terintegrasi optimal dengan dapur umum desa yang sering menjadi pusat aktivitas sosial dan pangan warga.

Ketidakterpaduan antara kelembagaan koperasi dan dapur umum menyebabkan rantai pasok pangan desa kurang efektif, kontribusi UMKM rendah, dan ketahanan pangan desa belum maksimal. Pemerintah daerah dan stakeholder terkait telah mendorong integrasi, namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan berupa tumpang-tindih peran lembaga, keterbatasan teknologi, serta minimnya sinergi pengelolaan sumber daya.

Pengembangan model bisnis kerakyatan berbasis kelembagaan dan sinkronisasi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan dapur umum di wilayah Das Kali Lamong dan kawasan Agropolitan sangat relevan mengingat kondisi faktual di Kabupaten Gresik. Pada 2025, Kabupaten Gresik telah menyelesaikan pengesahan 356 koperasi desa dan kelurahan, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih. DPRD Gresik juga aktif mendorong sinkronisasi program desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang produktif dan berdaya saing.

Di sisi lain, dapur umum di Gresik, termasuk program SPPG (Satuan Pendidikan Penyedia Makanan Gratis) dan dapur hibrid, telah diluncurkan secara masif untuk menjamin ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 86.327 penerima bantuan sosial pangan di Kabupaten Gresik, menunjukkan urgensi dan cakupan besar dari program dapur umum dalam menjaga kesejahteraan warga. Namun, integrasi antara koperasi desa dan dapur umum masih menghadapi

tantangan, terutama dalam hal sinergi rantai pasok, tata kelola kelembagaan, dan pemanfaatan potensi lokal.

Dengan dukungan anggaran dari APBD dan komitmen pemerintah daerah, koperasi desa diharapkan dapat bersinergi optimal dengan dapur umum, sehingga rantai pasok pangan lokal menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, model bisnis kerakyatan yang terintegrasi antara koperasi desa dan dapur umum diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan di Kabupaten Gresik Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa alternatif solusi telah diusulkan, seperti sinkronisasi kelembagaan melalui digitalisasi dan integrasi sistem rantai pasok pangan berbasis teknologi, penguatan ekosistem kemitraan dengan industri hilir, serta pelatihan pengelolaan koperasi dan dukungan permodalan dari pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif model bisnis kerakyatan yang melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dapur umum di wilayah Das Kali Lamong dan kawasan Agropolitan, dengan fokus pada empat sasaran utama. Pertama adalah bertujuan untuk menghasilkan instrument penilaian kelembagaan KDMP yang tervalidasi, kedua, kajian bertujuan mendeskripsikan kelembagaan dan tata kelola KDMP, termasuk struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta kualitas manajemen dan akuntabilitas dalam operasional koperasi di Kabupaten Gresik. Ketiga, kajian akan menyusun peta sinkronisasi model bisnis KDMP dengan dapur umum, untuk mengidentifikasi sinergi rantai pasok, integrasi program distribusi pangan, serta potensi kolaborasi antarlembaga dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Keempat, kajian akan merumuskan rekomendasi kebijakan

bagi pemerintah daerah agar dapat memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi program kolaboratif antara koperasi dan dapur umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat desa. Output kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Model Bisnis Ekonomi Kerakyatan: Kelembagaan Dan Sinkronisasi Koperasi Merah Putih Dengan Dapur Umum Di Wilayah Das Kali Lamong Dan Agropolitan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan validasi instrumen penilaian kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dapur umum untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang dikumpulkan dalam penilaian kinerja kedua lembaga.
b. Melakukan analisis mendalam terhadap kelembagaan dan tata kelola KDMP, termasuk struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
c. Melakukan identifikasi terhadap inisiasi kolaborasi dan upaya sinkronisasi antara KDMP dengan Dapur Umum, serta pemetaan model bisnis keduanya guna mengevaluasi potensi sinergi dan hambatan dalam integrase program, sekaligus menggambarkan alur integrase rantai pasok, distribusi pangan serta peluang kolaborasi antar lembaga.
d. Menyusun rekomendasi kebijakan daerah yang strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan,

peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi kolaborasi antara KDMP dan dapur umum

2. Sasaran/Output

Berdasarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan diperoleh adalah:

a. Tersedianya instrumen penilaian kelembagaan dan tata keola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasakan 6 aspek : aspek layanan, aspek proses, aspek sarana & prasarana, aspek manajemen & organisasi, aspek sumber daya manusia serta aspek hasil atau dampak yang telah di validasi.

b. Tersedianya deskripsi komprehensif mengenai kelembagaan dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), meliputi struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta kualitas manajemen dan akuntabilitas dalam operasional koperasi di Kabupaten Gresik.

c. Tersedianya peta sinkronisasi model bisnis KDMP dengan dapur umum, yang mencakup identifikasi sinergi rantai pasok, integrasi program distribusi pangan, serta potensi kolaborasi antarlembaga untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

d. Rekomendasi kebijakan daerah yang strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi program kolaboratif antara koperasi dan dapur umum

3. Spesifikasi Teknis

Tabel 1. Masalah, Sasaran, dan Spesifikasi Tenis

No	Masalah	Sasaran Yang Di Kaji	Spesifikasi Teknis
1	Kelembagaan KDMP belum teridentifikasi secara komprhensif.	Maksimal 6 KDMP di wilayah Benjeng & Balong Panggang.	Melakukan assessment penilaian terhadap 6 aspek kelembagaan dan tata kelola KDMP : 1. Aspek layanan 2. Aspek proses 3. Aspek manajamen & organisasi. 4. Aspek sarana& prasarana. 5. Aspek sumber daya manusia 6. Aspek hasil (dampak)
2	Belum terdapat inisiasi sinkronisasi KDMP & Dapur Umum	5 KDMP 3 Dapur UMUM	Melakukan identifikasi mekanisme inisasi sinkronisasi melalui : 1. Pemetaan potensi rantai pasokan (supply and demand) 2. Penyusunan peta sinkroniasi KDMP dengan dapur umum.

1.2 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

1. Jenis

   Kegiatan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian evaluatif.

2. Desain

   Desain atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *mix method* atau metode percampuran antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur kualitas kelembagaan dan tata kelola KDMP yang dilihat melalui 6 aspek. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam faktor pendukung, penghambat, potensi dan tantangan dalam inisiasi sinkronisasi bisnis KDMP & Dapur Umum

3. Populasi & Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 KDMP dan 2 Dapur Umum di Balongpanggang dan Benjeng.

b. Sample

Sampel diambil dengan teknik total sampling yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel penelitian.

c. Pengumpulan dan pengolahan data

1) Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan sasaran yang yaitu antara lain:

Tabel 2. Tujuan & Instrumen Penelitian

No	Tujuan/Sasaran	Teknik/Instrumen
1	Instrumen penilaian kelembagaan KDMP tervalidasi.	Melakukan literatur review dan menyusun kuisioner melalui proses FGD serta melakukan uji validitas terhadap kusioner.
2	Deskripsi kelembagaan dan tata kelola KDMP.	Survei dengan kuisoner terstruktur dengan berdasarkan pada 6 aspek.
3	Peta sinkronisasi model bisnis KDMP dengan Dapur Umum	Wawancara mendalam dengan pengelola KDMP & Dapur Umum.
4	Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan	Analisis triangulasi untuk menggabungkan temuan kualitatif dan kuantitatif serta diskusi dengan pemangku kepentingan.

2) Pengolahan data

Pengolahan data menggunakkan deskriptif kuantitatif serta analisis tematik kualitatif.

1.3 Penggunaan Personal

Tabel 3. Penggunaan personil

No	Nama	Jabatan	Tupoksi
1	Dr. Sukaris, SE.,MSM	Ketua Tim Ahli	Koordinasi tim, desain instrumen, supervisi lapangan, analisis data,

No	Nama	Jabatan	Tupoksi
			penyusunan laporan
2	Suwarno, SE., M.Si.	Anggota Tim Ahli	Fasilitasi FGD, koordinasi survei, analisis kualitatif
3.	Dr. Suwandi, S.E., M.A.	Anggota Tim Ahli	Pengumpulan data lapangan, entry data, verifikasi
4.	Hernum Daya Wati, S.M., M.M.	Anggota Ahli	Analisis data kuantitatif, pengolahan database, visualisasi
5.	Dr. Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM., M.Kes.	Anggota Ahli	Konsultasi kebijakan, validasi model, panduan pelaporan
6.	Endah Mulyani, SST., M.Kes	Anggota Tim Ahli	Koordinasi tim, desain instrumen, supervisi lapangan, analisis data, penyusunan laporan

1.4 Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Riset Pengembangan Mode Bisnis Kerakyatan : Kelembagaan Dan Sinkronisasi Koperasi Desa Merah Putih Dengan Dapur Umum Di wilayah DAS Kali Lamong Dan Argopolitan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap identifikasi dan menganalisis masalah
b. Tahap validasi instrumen pengumpulan data KDMP dan Dapur Umum.
c. Penyusunan Laporan Pendahuluan.
d. Paparan Laporan Pendahuluan.
e. Survei lapangan dan wawancara mendalam dengan pihak KDMP & Dapur Umum.
f. Tahap pemetaan suplay and demand Dapur Umum.
g. Penyusunan peta sinkroniasi KDMP dengan dapur umum
h. Tahapan Penyusunan rekomendasi dan strategi kebijakan.
i. Tahapan Penyelesaian Laporan Akhir/Revisi.
j. Paparan Laporan Akhir

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan Riset Pengembangan Mode Bisnis Kerakyatan : Kelembagaan Dan Sinkronisasi Koperasi Desa Merah Putih Dengan Dapur Umum Di wilayah DAS Kali Lamong Dan Argopolitan secara teknis diselesaikan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak ditandatangani kontrak/surat perintah kerja (SPK). Jadwal dan waktu dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Minggu					
		1	2	3	4	5	6
1	Tahap identifikasi dan menganalisis masalah						
2	Tahap validasi instrumen pengumpulan data KDMP dan Dapur Umum.						
3	Penyusunan Laporan Pendahuluan.						
4	Paparan Laporan Pendahuluan.						
5	Survei lapangan dan wawancara mendalam dengan pihak KDMP & Dapur Umum.						
6	Tahap pemetaan suplay and demand Dapur Umum.						
7	Penyusunan peta sinkroniasi KDMP dengan dapur umum						
8	Tahapan Penyusunan rekomendasi dan strategi kebijakan.						
9	Tahapan Penyelesaian Laporan Akhir/Revisi.						
10	Paparan Laporan Akhir						

1.5 Mitigasi Risiko, Monitoring dan Evaluasi

1. Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi

Rencana mitigasi risiko merupakan upaya nyata tim UMG untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Rencana mitigasi yang disusun diutamakan untuk

mengendalikan risiko yang berada dalam kendali tim UMG. Tabel di bawah ini menyajikan pekerjaan, risiko, tingkat risiko, dan rencana mitigasinya, khususnya untuk menangani level risiko yang berstatus ekstrim atau tinggi. Rencana mitigasi umumnya merupakan berbagai tindakan konkrit yang akan diwujudkan agar tim UMG di kemudian hari dapat meniadakan status tingkat risikonya dari tingkat risiko ekstrim atau tinggi menjadi tingkat risiko medium atau rendah. Rencana mitigasi dapat pula diarahkan untuk memperkecil tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko dan/atau memperkecil besar dampak suatu risiko. Untuk setiap rencana mitigasi risiko yang teridentifikasi telah ditetapkan pula penanggung jawab penanganannya

Tabel 5. Mitigasi Resiko

No	Pekerjaan	Risiko	Tingkat resiko	Penyebab	Rencana mitigasi resiko	PIC
1	**Persiapan**					
a.	Penentuan ketercapaian jumlah sampel	Target sampel per anggota tim tidak memenuhi	sedang	·Jarak antar sampel mungkin berjauhan ·Kesibukan anggota tim	Dilakukan pemetaan dan penjadwalan ke lokasi.	Dr. Sukaris S.E., M.S.M.
2	**Penyusunan Laporan Pendahuluan**					
a.	Koordinasi atau waancara dengan DPMD	Kesulitan menemukan masalah yang urgensi diselesaikan	tinggi	Tim belum mengetahui permasalahan.	Wawancara dengan DPMD	Suwarno, SE., M.Si..
b.	Analisa data	Pembaca kesulitan membaca hasil pengukuran	sedang	Tabel/gambar tidak sesuai tujuan penelitian	Membuat kerangka hasil analisis data	Endah Mulyani, S.ST., M.Kes.
				Tata bahasa yang digunakan tidak sesuai Bahasa Indonesia	Double checking hasil analisis data oleh tim	

No	Pekerjaan	Risiko	Tingkat resiko	Penyebab	Rencana mitigasi resiko	PIC
				yang baik dan benar		
3	**Paparan Laporan Pendahuluan**					
a.	Presentasi	Data yang disajikan tidak lengkap	sedang	·Tim kurang teliti terhadap data awal yang seharusnya dibutuhkan ·Tim kurang teliti memasukan hasil data ke file ppt	·Koordinasi data dengan DPMD ·Double checking oleh tim	Dr. Sukaris S.E., M.S.M.
4	**Survei dan Pengumpulan Data**					
a.	Pengisian instrument penelitian	Instrumen tidak terisi lengkap	tinggi	Tim belum mengetahui strategi pengisian instrumen	·Perlu ada simulasi pengisian instrument penelitian sebelum dilakukan observasi ·Tim menghubungi responden untuk memastikan data yang belum terisi	Hernum Daya Wati, S.M., M.M.

No	Pekerjaan	Risiko	Tingkat resiko	Penyebab	Rencana mitigasi resiko	PIC
b.	Observasi responden	KDMP menolak kehadiran tim	tinggi	KDMP belum mengetahui maksud kedatangan tim	·Perlu ada surat tugas atau surat pengumuman atau pendampingan dari DPMD saat observasi ·Tim melakukan pendekatan secara personal	Dr. Suwandi, S.E., M.A.
c.	Tim melakukan validasi hasil wawancara kepada responden	Data yang diberikan responden dikhawatirkan bias	tinggi	Responden terlihat ragu-ragu	Responden diminta menunjukan bukti	Suwarno, SE., M.Si.
5	**Pengolahan Data**					
a.	Analisis data	Kurang dalam analisis data	sedang	Kurang teliti memasukan data	Double checking oleh tim	Endah Mulyani, S.ST., M.Kes.
6	**Penyusunan Rekomendasi dan Kebijakan**					
a.	FGD dengan Bappeda	Hasil pengukuran tidak memuaskan	sedang	Kurang teliti dalam Analisa data	Double checking oleh tim	Dr. Suwandi, S.E., M.A
		Perbedaan pendapat terhadap hasil pengukuran	sedang	Adanya perbedaan persepsi terkait hasil	·Memperkuat referensi ·Adanya mediator	
7	**Penyelesaian Laporan Akhir**					
	Tim memperbaiki laporan akhir	Tim belum memasukan saran hasil FGD	Tinggi	Tim kurang teliti membaca berita acara	Tim melakukan double checking	Hernum Daya Wati, S.M., M.M.
8	**Paparan Laporan Akhir**					
a.	Presentasi	Data yang disajikan tidak lengkap	rendah	Tim kurang teliti memasukan data ke file ppt	Double checking oleh tim	Dr. Sukaris S.E., M.S.M.
		Kesalahahan penulisan	rendah	Pengerjaan laporan		

No	Pekerjaan	Risiko	Tingkat resiko	Penyebab	Rencana mitigasi resiko	PIC
				tergesa-gesa		
b.	FGD hasil penelitian dan tindak lanjut	Adanya ketidakteri maan hasil pengukuran	Sedang	Khawatir citra KDMP di kota Gresik rendah	Perlu adanya moderator sebagai penengah	Dr. Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM., M.Kes.
					Tim mendengarkan saran dari saksi ahli atau Bappeda	

2. Monitoring dan Evaluasi

   a. Tim melakukan double cek instrument penelitian yang berupa lembar check list
   b. Tim melakukan evaluasi hasil isian check list bersama Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Gresik

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Koperasi Desa Merah Putih

2.1.1 Pengertian KDMP

Koperasi Desa Merah Putih adalah sebuah bentuk koperasi yang dibangun di tingkat desa dengan tujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, berlandaskan nilai-nilai gotong royong, persatuan, dan semangat nasionalisme (Merah Putih).

"Merah Putih" di sini bukan sekadar nama, tetapi **identitas nilai** yang mendorong koperasi menjadi lembaga ekonomi yang jujur, amanah, dan mementingkan kepentingan rakyat desa. Koperasi ini berfungsi untuk:

1. Memperkuat ekonomi lokal desa melalui unit usaha produktif (pertanian, perdagangan, simpan pinjam, UMKM, dan lain-lain).
2. Menjadi wadah pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola potensi desa secara mandiri.
3. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.
4. Mengintegrasikan nilai kebangsaan yaitu dengan simbol Merah Putih yang berutjuan untuk menciptakan koperasi yang jujur, amanah, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Secara prinsip, **Koperasi Desa Merah Putih** mengikuti prinsip umum koperasi, yaitu antara lain :

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan demokratis

3. Pembagian SHU secara adil
4. Kemandirian
5. Pendidikan perkoperasian
6. Kerja sama antarkoperasi

2.1.2 Landasan Hukum KDMP

KDMP tetap tunduk pada seluruh peraturan perkoperasian nasional. Landasan hukumnya meliputi:

1. Landasan Konstitusional

   UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)–(4). Menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah bentuk paling konkret dari asas ini.

2. Landasan Undang – Undang

   Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjadi dasar utama pendirian, pengelolaan, dan pengawasan koperasi.

3. Peraturan Pelaksanaan

   Peraturan Pemerintah terkait operasional koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM tentang:

   a. Tata cara pendirian koperasi
   b. Penilaian kesehatan koperasi
   c. Pengelolaan laporan keuangan
   d. Perlindungan usaha koperasi

4. Landasan Lokal

Peraturan Daerah (Perda) tentang perkoperasian atau pemberdayaan ekonomi desa dan Peraturan Desa (Perdes) terkait pemanfaatan aset dan dukungan desa pada koperasi.

5. Landasan Internal

   AD/ART Koperasi Desa Merah Putih yang mengatur struktur organisasi, mekanisme rapat, keanggotaan, usaha, dan tata kelola.

2.1.3 Kelembagaan KDMP

Koperasi Desa Merah Putih memiliki strukut organisasi standar koperasi, ditmbah fungsi pemberdayaan khas “Merah Putih” yaitu melalui :

1. Rapat Anggota

   Melaluai rapat anggota kekuasaan tertinggi koperasi, menentukan :

   a. Kebijakan strategis.
   b. Program kerja dan
   c. Pengangkatan dan pemberhentian pengusus/pengawas.

2. Pengurus

   Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab dalam :

   a. Pengelolaan operasional
   b. Pengambilan keputusan manajerial
   c. Pelayanan anggota
   d. Pengembangan unit usaha.

3. Pengawas

   Pengawas koperasi melakukan :

   a. Pengawasan kinerja pengurus
   b. Audit manajemen

c. Evaluasi kepatuhan hukum dan AD/ART

4. Manajer/Staff Operasional

   Penguatan struktur koperasi yang berkembang dilakukan dengan membentuk:

   a. Manager unit usaha

   b. Administrasi & keuangan

   c. Marketing & produksi

   d. Tim pemberdayaan dan pendampingan UMKM

5. Unit Usaha

   Pembentukan unit usaha yang disesuikan dengan potensi desa yaitu antara lain :

   a. Pertanian

   b. Perdagangan

   c. Jasa keuangan mikro

   d. Pengolahan hasil bumi

   e. Pariwisata desa, dll.

2.1.4 Tata Kelola & Manajemen Koperasi

Koperasi Desa Merah Putih menerapkan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) yaitu antara lain :

1. Transparansi. Laporan keuangan terbuka untuk anggota.
2. Akuntabiltas. Setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Responbilitas. Mematuhi aturan hukum & etika sosial.
4. Independensi. Bebas dari konflik kepentingan personal.
5. Keadilan. Mengutamakan kepentingan anggota.

Sistem manajemen Koperasi Desa Merah Putih antara lain adalah :

1. Pengelolaan keuangan berbasis sistem (manual/digital)
2. SOP unit usaha
3. Pembukuan sesuai standar akuntansi koperasi
4. Mekanisme audit internal dan eksternal
5. Evaluasi tahunan dan pengembangan kapasitas SDM
6. Digitalisasi tata kelola melalui system kas digital serta applikasi pelaporan & monitoring usaha serta intergasi dengan marketplace desa.

2.1.5 Model Bisnis & Usaha KDMP

Koperasi Desa Merah Putih dapat mengembangkan berbagai model bisnis sesuai potensi lokal yaitu antara lain :

1. Model bisnis berbasis komoditas desa

   Model bisnis berbasis komoditas desa adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal sebagai aset utama. Komoditas unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, maupun kerajinan khas dijadikan basis produksi dan pemasaran. Dalam model ini, desa mengembangkan rantai nilai mulai dari budidaya, pengolahan, hingga distribusi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus, sehingga petani dan produsen lokal dapat memperoleh pendapatan lebih besar, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

2. Model bisnis simpan pinjam

   Model bisnis simpan pinjam desa merupakan skema layanan keuangan mikro yang dikelola oleh lembaga ekonomi desa, seperti BUMDes atau koperasi, untuk menyediakan akses pembiayaan bagi warga. Masyarakat dapat

menyimpan dana sekaligus meminjam modal dengan syarat yang lebih mudah dan bunga terjangkau. Model ini dirancang untuk mendukung perputaran ekonomi lokal, membantu UMKM kecil, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Selain memberikan keuntungan finansial bagi lembaga pengelola, model ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui inklusi keuangan.

3. Model bisnis desa wisata

   Model bisnis desa wisata menekankan pada pengembangan daya tarik alam, budaya, dan sosial desa sebagai produk wisata yang bernilai jual. Desa mengelola paket wisata yang mencakup atraksi, edukasi, akomodasi, dan layanan pendukung lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Fokusnya adalah menciptakan pengalaman otentik bagi wisatawan, seperti wisata alam, kuliner lokal, kerajinan tradisional, ataupun budaya setempat. Melalui model ini, desa memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

4. Model bisnis UMKM/Industri rumah tangga

   Model bisnis UMKM dan industri rumah tangga di desa berorientasi pada pengembangan usaha produktif skala kecil yang memanfaatkan keterampilan masyarakat dan sumber daya lokal. Produk yang dihasilkan biasanya berupa makanan olahan, kerajinan tangan, pakaian, atau produk kreatif lainnya. Desa berperan dalam mendukung proses produksi, pemasaran, packaging, dan akses pasar, termasuk digitalisasi melalui marketplace. Model ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan

keluarga, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi desa.

5. Model bisnis energi terbarukan

   Model bisnis energi terbarukan di desa memanfaatkan sumber energi alami seperti matahari, air, angin, atau biomassa untuk menghasilkan listrik dan bahan bakar alternatif. Desa dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), mikrohidro, atau biogas yang dikelola secara komunal. Selain menyediakan akses energi yang lebih murah dan mandiri, model ini juga mendorong keberlanjutan lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pendapatan desa dapat diperoleh dari penjualan listrik atau jasa pengelolaan instalasi energi kepada warga dan pelaku usaha.

6. Model bisnis kerakyatan

   Model bisnis kerakyatan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan usaha. Seluruh proses, mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi, dilakukan secara gotong royong dengan tujuan kesejahteraan bersama. Model ini menekankan kepemilikan kolektif, partisipasi warga, dan distribusi manfaat yang adil. Contohnya adalah koperasi rakyat, usaha kolektif berbasis komunitas, atau pengelolaan aset desa secara bersama. Dengan pendekatan ini, desa dapat memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kemandirian, dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

6.1.1 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan & Dampak Sosial

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam Kerangka Desa Mandiri dan Produktif (KDMP) merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang

menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat. Konsep ini menekankan pada penguatan kapasitas individu dan kelompok melalui akses terhadap sumber daya, pengetahuan, modal, teknologi, dan pasar. Dengan demikian, masyarakat mampu mengelola usaha secara mandiri, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kesejahteraan jangka panjang. Pemberdayaan dilakukan melalui penguatan kelembagaan desa seperti BUMDes, koperasi, kelompok usaha, hingga UMKM, sehingga kegiatan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Model ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, agar arah pembangunan ekonomi benar-benar sesuai kebutuhan dan potensi lokal.

6.1.2 Tantangan & Rekomendasi Pengembangan

Dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih secara umum memiliki berbagai tantangan, berikut adalah tantangan dan rekomendasi pengembangan yang bisa diterapkan dalam pengelolaan KDMP :

Tabel 6. Tantangan & Rekomendasi Pengembangan

TANTANGAN	REKOMENDASI PENGAMBANGAN
SDM dan literasi koperasi masih rendah.	**Penguatan kapasitas SDM** melalui pelatihan manajemen & digitalisasi.
Pengelolaan keuangan belum tertib	Kerja sama dengan BUMDes, Pemdes, dan UMKM lokal.
Keterbatasan modal dan akses pembiayaan	**Diversifikasi usaha** berbasis potensi desa
Kurangnya inovasi model bisnis	**Digitalisasi koperasi**: pencatatan keuangan, pemasaran online, dan aplikasi layanan anggota.
Minimnya dukungan teknologi digital	**Mengakses dana pemerintah**: LPDB-KUMKM, Dana Desa, CSR.
Persaingan dengan pasar modern	**Membangun jaringan pasar**: marketplace, mitra distributor, dan e-commerce.
Perubahan kebijakan dan regulasi	**Menanamkan nilai Merah Putih** sebagai budaya: jujur, disiplin, persatuan, dan gotong royong.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian Koperasi Desa Merah Putih

1. Aspek 1 : Aspek Program Layanan

Tabel 7.Hasil Penilaian Aspek 1 Layanan KDMP

	Pernyataan	Indikator				
		0	1	2	3	4
1.	Koperasi Desa Merah Putih memiliki Ketersediaan jenis layanan (simpan pinjam, pemasaran, pelatihan, kredit, penampungan hasil pertanian dan UMKM).	60%	40%	0%	0%	0%
2.	Koperasi Desa Merah Putih memiliki Inovasi Bisnis dan layanan yang diberikan kepada anggota	20%	0%	0%	20%	60%
3	Koperasi Desa Merah Putih "memiliki komitmen untuk meningkatkan Kualitas layanan pada anggota"	0%	20%	0%	20%	60%
4	Koperasi Desa Merah Putih siap bekerjasama dengan pihak lain terkait	0%	0%	0%	0%	100%
5	Koperasi KDMP telah memiliki kerjasama dengan pihak lain	20%	0%	0%	0%	80%
6	Koperasi KDMP telah Bekerjasam dengan Dapur Umum BGN	20%	40%	20%	20%	0%
7	Secara umum Koperasi Desa Merah Putih Siap mengembang kan Koperasi	0%	0%	0%	20%	80%

Berdasarkan hasil penilaian aspek 1 mengenai program layanan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan dinamika yang menarik antara ketersediaan layanan, inovasi, komitmen kualitas, serta kesiapan koperasi dalam bekerja sama dengan pihak luar. Dari sisi ketersediaan layanan, mayoritas responden menilai bahwa koperasi masih belum menyediakan jenis layanan yang memadai, terbukti dengan 60% responden memberikan skor 0, sementara 40% lainnya hanya memberikan skor 1. Tidak adanya responden yang memberi nilai tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa koperasi belum menyediakan beragam layanan simpan-pinjam, pemasaran, pelatihan, atau penampungan hasil

pertanian sebagaimana idealnya koperasi serba usaha. Fakta ini sekaligus menandakan adanya jarak antara praktik pelayanan koperasi KDMP dan prinsip dasar koperasi yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa koperasi seharusnya menyediakan layanan ekonomi yang relevan dan bermanfaat bagi anggota.

Meskipun demikian, hasil berbeda muncul pada indikator inovasi bisnis dan layanan. Sebanyak 60% responden memberikan skor tertinggi (4), sementara sisanya terbagi pada skor 3 dan skor 0. Data ini menunjukkan bahwa anggota melihat koperasi memiliki kreativitas dalam merancang layanan, meskipun layanan dasar masih terbatas. Kondisi ini sesuai dengan teori inovasi layanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Bitner & Gremler (2018), bahwa inovasi tidak selalu terkait pada banyaknya layanan yang tersedia, melainkan pada cara layanan tersebut dikembangkan agar memberi nilai tambah bagi anggota. Hal ini dapat terjadi ketika koperasi mencoba terobosan baru, bekerja sama dengan pihak lain, atau melakukan kegiatan yang dianggap progresif oleh anggota, sehingga inovasi dinilai tinggi meskipun layanan inti belum kuat.

Pada aspek komitmen koperasi dalam meningkatkan kualitas layanan, sebagian besar responden (60%) memberikan skor 4, yang menunjukkan keyakinan anggota terhadap niat pengurus untuk memperbaiki pelayanan. Komitmen ini merupakan salah satu komponen penting dalam teori SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988), khususnya dalam dimensi reliability dan responsiveness, yang menekankan kemampuan lembaga dalam memenuhi janji layanan serta merespons kebutuhan anggota. Persepsi positif ini dapat menunjukkan bahwa meskipun koperasi belum menyediakan layanan secara luas,

pengurus dinilai memiliki itikad dan usaha untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Indikator mengenai kesiapan bekerja sama memperlihatkan hasil yang sangat kuat, dengan 100% responden memberi skor 4, menandakan kesepakatan bulat bahwa koperasi siap bermitra dengan pihak luar. Penilaian ini diperkuat dengan fakta bahwa 80% responden menilai koperasi sudah memiliki kerja sama dengan pihak lain. Kesiapan dan keterbukaan ini sangat penting dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal sebagaimana dijelaskan oleh Todaro & Smith (2015), bahwa kerja sama antar lembaga menjadi motor penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kapasitas lembaga lokal, serta memperluas sumber daya dan jaringan ekonomi. Namun demikian, data mengenai kerja sama spesifik dengan Dapur Umum BGN menunjukkan penilaian yang beragam, mulai dari skor 0 hingga skor 3. Ketidakkonsistenan persepsi ini menunjukkan bahwa kerja sama tersebut belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan anggota, sehingga terdapat kemungkinan kurangnya komunikasi, sosialisasi, atau pelibatan anggota secara langsung.

Indikator terakhir mengenai kesiapan koperasi untuk mengembangkan diri menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan 80% responden memberikan skor 4, dan 20% lainnya memberikan skor 3. Tingginya kepercayaan anggota terhadap potensi pengembangan koperasi mencerminkan adanya modal sosial (Putnam, 1993) yang kuat, berupa kepercayaan, rasa memiliki, dan harapan kolektif terhadap kemajuan organisasi. Modal sosial ini merupakan fondasi penting yang dapat memperkuat kelembagaan koperasi dan menjadi peluang besar untuk merancang program layanan yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis fakta, teori, dan opini, dapat

disimpulkan bahwa koperasi KDMP berada pada fase pertumbuhan yang ditandai oleh komitmen kuat untuk memperbaiki layanan, inovasi yang mulai berjalan, serta kesiapan menjalin kemitraan secara luas. Namun, kelemahan mendasar pada indikator ketersediaan layanan menunjukkan bahwa koperasi perlu memperkuat layanan inti sebagai fondasi utama. Inovasi dan kerja sama yang sudah berjalan perlu dikaitkan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang secara langsung dirasakan oleh anggota. Dengan memperbaiki layanan dasar, memperkuat koordinasi kemitraan, dan memanfaatkan modal sosial yang kuat, KDMP memiliki peluang besar menjadi koperasi yang lebih kokoh, adaptif, dan bermanfaat bagi masyarakat desa

2. Aspek 2 : Aspek Proses KDMP

Tabel 8. Hasil Penilaian Aspek 2 Proses KDMP

	Pernyataan	ndikator				
		0	1	2	3	4
1	Prosedur Operasional dan pelayanan di koperasi Desa Merah Putih sudah disusun secara jelas dan mudah dipahami	0%	0%	20%	60%	20%
2	Alur Operasional dan pelayanan di koperasi Desa Merah Putih "dapat dijalankan secara konsisten oleh seluruh pengurus"	0%	20%	0%	20%	60%
3	Operasional dan pelayanan di koperasi Desa Merah Putih kepada anggota dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar	0%	0%	20%	0%	80%
4	Pengurus merespons permintaan layanan anggota dengan cepat	0%	0%	0%	60%	40%
5	Proses Operasional dan pelayanan di koperasi Desa Merah Putih tidak berbelit- belit dan mudah dilakukan	0%	0%	0%	20%	80%
6	Pengurus selalu mengikuti SOP Operasional dan pelayanan di koperasi Desa Merah Putih yang telah ditetapkan	0%	0%	0%	0%	100%
7	Informasi mengenai persyaratan Operasional dan pelayanan di koperasi Desa Merah Putih selalu disampaikan secara lengkap kepada anggota	0%	20%	0%	0%	80%
8	Data dan dokumen Operasional dan pelayanan di koperasi Desa Merah Putih "diproses secara teliti dan akurat"	0%	20%	0%	60%	20%
9	Pengurus berkoordinasi dengan baik antar-unit untuk memperlancar proses Operasional dan pelayanan di koperasi Desa Merah Putih	0%	20%	0%	20%	60%

10	Koperasi Desa Merah Putih secara rutin melakukan evaluasi untuk memperbaiki proses Operasional dan pelayanan	0%	20%	0%	20%	60%

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aspek 2 proses operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan bahwa koperasi telah memiliki prosedur layanan yang cukup kuat dan konsisten, meskipun beberapa aspek masih memerlukan penguatan. Pada indikator pertama tentang kejelasan prosedur operasional, sebanyak 60% responden memberikan skor 3 dan 20% memberikan skor 4, sementara 20% lainnya memberikan skor 2, menunjukkan bahwa mayoritas anggota menilai prosedur telah disusun dengan jelas dan mudah dipahami, namun masih terdapat sebagian kecil anggota yang merasakan perlunya lebih banyak penjelasan atau penyederhanaan prosedur. Kejelasan prosedur ini merupakan unsur penting dalam teori manajemen operasional, di mana proses layanan harus terdokumentasi dengan baik agar dapat dijalankan secara efektif (Heizer & Render, 2014).

Indikator kedua mengenai konsistensi pelaksanaan alur operasional menunjukkan persepsi yang sangat positif, dengan 60% responden memberikan skor 4, namun juga terdapat 20% memberikan skor 1, dan 20% memberikan skor 3. Ketidakhomogenan penilaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus telah bekerja secara konsisten, tetapi masih ada pengalaman anggota yang merasa bahwa konsistensi belum merata di seluruh unit. Hal ini menguatkan pentingnya pendekatan standarisasi proses sebagaimana dijelaskan oleh Deming dalam prinsip *continuous improvement*.

Pada indikator ketepatan waktu pelayanan, koperasi mendapatkan apresiasi tinggi dengan 80% responden memberikan skor 4, dan sisanya 20% memberi skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas layanan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai standar waktu layanan yang disepakati. Menurut teori kualitas layanan, ketepatan waktu merupakan bagian dari dimensi *reliability* yang menggambarkan kemampuan organisasi memenuhi janji layanan (Parasuraman et al., 1988).

Indikator responsivitas menunjukkan hasil yang positif pula, dengan 60%

responden memberi skor 3 dan 40% memberi skor 4, yang berarti anggota menilai pengurus cukup cepat dalam merespons permintaan layanan. Responsivitas merupakan salah satu fondasi pelayanan publik dan koperasi, di mana kecepatan dan ketepatan respons menjadi indikator langsung kualitas interaksi layanan. Indikator berikutnya tentang kemudahan proses mendapat penilaian sangat tinggi, dengan 80% responden memberikan skor 4 dan 20% memberikan skor 3. Tidak adanya penilaian pada skor 0–2 menunjukkan bahwa proses operasional di KDMP sudah dianggap sederhana dan tidak berbelit-belit. Teori *service simplicity* menekankan bahwa proses yang mudah meningkatkan kepuasan anggota dan mengurangi beban administratif (Kotler & Keller, 2016).

Salah satu indikator paling kuat adalah kepatuhan pengurus terhadap SOP, dengan 100% responden memberikan skor 4, menunjukkan adanya konsensus yang kuat bahwa SOP benar-benar dijalankan. Hal ini menunjukkan kedisiplinan organisasi yang baik, sesuai prinsip tata kelola koperasi yang sehat. Dari aspek penyampaian informasi, mayoritas anggota menilai bahwa informasi mengenai persyaratan layanan telah disampaikan dengan lengkap, dengan 80% memberi skor 4, meskipun terdapat 20% yang menilai pada skor 1. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kanal informasi agar tidak terjadi kesenjangan persepsi antaranggota.

Indikator tentang ketelitian pemrosesan dokumen menunjukkan hasil yang cukup positif, meskipun tidak setinggi indikator lainnya. Sebanyak 60% responden memberi skor 3 dan masing-masing 20% memberi skor 1 dan 4, mengindikasikan bahwa meskipun ketelitian sudah baik, masih ada sebagian anggota yang merasakan adanya kekurangan dalam akurasi data. Ketelitian administrasi sangat penting dalam koperasi, karena berhubungan langsung dengan akuntabilitas dan kepercayaan anggota. Selanjutnya, indikator koordinasi antar-unit mendapatkan hasil yang baik, dengan 60% memberikan skor 4, namun terdapat masing-masing 20% yang menilai pada skor 1 dan 3. Ini menunjukkan bahwa koordinasi internal sudah berjalan cukup efektif, tetapi belum

homogen di seluruh unit. Koordinasi yang baik merupakan kunci kelancaran alur layanan sesuai teori *organizational communication*.

Terakhir, indikator evaluasi rutin juga menunjukkan kecenderungan positif, dengan 60% responden memberi skor 4, 20% pada skor 3, dan 20% pada skor 1. Artinya, meskipun evaluasi sudah dilakukan secara rutin, sebagian anggota belum merasakan dampak langsung atau belum mengetahui detail implementasi evaluasi tersebut.Secara keseluruhan, hasil penilaian Standar 2 menunjukkan bahwa KDMP memiliki proses operasional yang relatif kuat, dengan SOP yang dijalankan dengan baik, ketepatan waktu layanan, kemudahan proses, serta responsivitas yang dinilai tinggi oleh anggota. Namun demikian, aspek konsistensi, akurasi administrasi, dan penyampaian informasi masih perlu diperkuat. Mengacu pada teori manajemen mutu total (TQM), koperasi berada dalam posisi yang baik untuk melakukan *continuous improvement*, terutama dengan memanfaatkan kekuatan kepatuhan SOP dan ketepatan waktu sebagai modal dasar untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.

3. Aspek 3 : Aspek Manajemen Organisasi

Tabel 9. Hasil Penilaian Aspek 3 Manajemen Organisasi KDMP

	Pernyataan	Indikator				
		0	1	2	3	4
1	Kepengurus an Koperasi Desa Merah Putih memiliki legalitas (Pengurus, dan Pengawas)	0%	0%	0%	0%	100%
2	Koperasi Desa Merah Putih memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,dan peraturan internal KDMP	0%	0%	0%	0%	100%
3	Koperasi Desa Merah Putih memiliki visi, misi, program serta Standar Operasional Prosedur operasional dan pelayanan	0%	0%	0%	0%	100%
4	Koperasi Desa Merah Putih memiki sistem dan mekanisme koordinasi serta pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan tugas operasional Koperasi	0%	0%	0%	40%	60%
5	Koperasi Desa Merah Putih memiliki sistem dan manajemen data base yang bersifat tertulis dan atau berbasis teknologi digital	0%	0%	20%	20%	60%
6	Koperasi Desa Merah Putih memiliki media promosi dan publikasi produk dan hasil yang mudah diketahui oleh masyarakat	0%	0%	20%	0%	80%
7	Koperasi Desa Merah Putih melakukan dokumentasi dan pengarsipan terhadap semua	0%	0%	20%	20%	60%

8	dokumen operasional dan layanan Koperasi Desa Merah Putih memiliki kemitraan dan kerjasama strategis, melalui perjanjian kerjasama (MOU) dengan pemangku kepentingan terkait	0%	0%	0%	20%	80%

Berdasarkan hasil penilaian aspek 3 mengenai Manajemen Organisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan bahwa koperasi telah memiliki fondasi kelembagaan yang sangat kuat, terutama pada elemen-elemen dasar tata kelola organisasi. Seluruh responden (100%) memberikan skor 4 pada tiga indikator awal, yaitu legalitas kepengurusan dan pengawas, keberadaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kepemilikan visi, misi, program, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi. Fakta ini menegaskan bahwa KDMP telah memenuhi prinsip dasar tata kelola koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi harus memiliki legalitas yang jelas serta dokumen dasar organisasi sebagai dasar operasional. Kejelasan visi, misi, AD/ART, dan SOP menunjukkan bahwa KDMP memiliki struktur kelembagaan yang sudah sesuai dengan standar modern, mencerminkan komitmen pengurus dalam membangun pondasi organisasi yang formal dan terpercaya.

Indikator keempat mengenai mekanisme koordinasi dan pembagian tugas menunjukkan penilaian yang cukup positif, dengan 60% responden memberikan skor 4, dan 40% memberikan skor 3. Ini menunjukkan bahwa sistem koordinasi internal telah berjalan baik, meskipun masih ada sebagian anggota yang menilai bahwa mekanisme tersebut perlu ditingkatkan. Dalam perspektif teori organisasi (Robbins & Judge, 2017), pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang konsisten merupakan elemen penting dalam efektivitas kelembagaan, yang dapat memperlancar alur kerja dan mengurangi tumpang tindih wewenang antarunit.

Pada indikator kelima mengenai sistem manajemen basis data, hasil menunjukkan tingkat keberlanjutan yang sedang berkembang. Sebanyak 60% responden memberikan skor 4, namun terdapat masing-masing 20% yang memberikan skor 2 dan 3. Data ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas anggota menilai manajemen data sudah baik, masih terdapat sebagian yang merasa sistem tersebut belum sepenuhnya tertata atau belum sepenuhnya digital. Manajemen database merupakan bagian penting dari modernisasi koperasi, terutama dalam menghadapi tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Menurut teori *knowledge management* (Davenport & Prusak, 1998), pengelolaan data yang baik meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Aspek promosi dan publikasi produk juga menunjukkan hasil yang kuat, dengan 80% responden memberikan skor 4, meskipun ada 20% yang memberi skor 2. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi sudah memiliki media publikasi yang dapat diakses masyarakat, baik secara online maupun offline, namun efektivitasnya masih belum dirasakan secara merata oleh anggota. Dalam era digital, publikasi merupakan faktor penting untuk menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan daya saing koperasi (Kotler & Keller, 2016).

Pada indikator ketujuh mengenai dokumentasi dan pengarsipan, 60% responden memberi skor 4, sementara 20% masing-masing memberi skor 2 dan 3. Dokumentasi yang baik merupakan bagian dari akuntabilitas organisasi. Variasi penilaian menunjukkan bahwa meskipun praktik dokumentasi sudah berjalan, sebagian anggota mungkin belum memahami sistem dokumentasi yang ada atau merasakan bahwa proses pengarsipan belum dilakukan secara maksimal.

Mengacu pada teori administrasi publik (Denhardt, 2011), dokumentasi merupakan aspek penting yang menjamin transparansi dan memastikan setiap kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator terakhir tentang kemitraan dan kerja sama strategis memperoleh penilaian sangat positif, dengan 80% responden memberikan skor 4 dan 20% memberikan skor 3. Penilaian ini menunjukkan bahwa KDMP telah memiliki jaringan kerja sama melalui MoU dengan berbagai pemangku kepentingan, yang dapat memperkuat keberlanjutan program koperasi. Dalam teori pembangunan ekonomi lokal (Todaro & Smith, 2015), kemitraan merupakan elemen penting untuk memperluas skala layanan, memperoleh akses sumber daya baru, dan meningkatkan kapasitas organisasi. Kerja sama strategis menjadi bukti bahwa KDMP tidak hanya aktif secara internal tetapi juga membangun jejaring eksternal untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga ekonomi desa.

Secara keseluruhan, hasil penilaian Aspek 3 menggambarkan bahwa KDMP memiliki struktur organisasi yang matang dan legalitas yang kuat, dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelembagaan yang lengkap dan sistem kerja organisasi yang tertata. Namun, beberapa aspek seperti penguatan database, dokumentasi, dan publikasi memerlukan peningkatan agar dapat memberikan dampak yang merata bagi seluruh anggota. Dengan modal dasar kelembagaan yang sangat baik serta hubungan kemitraan yang progresif, KDMP berada dalam posisi yang sangat strategis untuk tumbuh sebagai koperasi modern yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

4. Aspek 4 : Aspek Sarana Prasarana

Tabel 10. Hasil Penilaian Aspek 4 Sarana Prasarana KDMP

Pernyataan	Indikator

		0	1	2	3	4
1	Koperasi Desa Merah Putih memiliki fasilitas gedung yang bersifat permanen, "dengan status milik Koperasi dan mudah diakses oleh anggota"	60%	0%	20%	0%	20%
2	Koperasi Desa Merah Putih memiliki sarana prasarana perkantoran	40%	20%	20%	0%	20%
3	Koperasi Desa Merah Putih menyediakan tempat dokumen KDMP yang terjamin kerahasiaannya	0%	20%	20%	40%	20%
4	Koperasi Desa Merah Putih memiliki fasilitas gudang yang memadayang bersifat permanen, dengan status milik Koperasi dan dapat digunaka untuk operasional	60%	20%	0%	0%	20%
5	Koperasi Desa Merah Putih memiliki Kendaraan yang layak dengan status milik Koperasi dan mudah digunakan untuk operasional	100%	0%	0%	0%	0%
6	Koperasi Desa Merah Putih memiliki Ketersediaan perangkat digital (komputer, "printer, internet)."	40%	40%	0%	0%	20%
7	Koperasi Desa Merah Putih memiliki ketersediaan fasilitas operasional kantor yang memadai (penyimpanan file, lemari arsip, dll)	0%	20%	20%	40%	20%

Hasil penelitian pada Aspek 4 mengenai sarana dan prasarana Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan bahwa kondisi fisik kelembagaan masih memerlukan banyak penguatan untuk menunjang operasional dan layanan yang optimal. Pada indikator pertama mengenai fasilitas gedung permanen milik koperasi, data menunjukkan bahwa **60% responden memberikan skor 0**, sementara hanya **20% yang memberikan skor 4**, dan sisanya terbagi pada skor 2. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota menilai gedung koperasi belum memenuhi standar permanen yang ideal, atau belum sepenuhnya dimiliki oleh koperasi. Menurut prinsip koperasi dan teori kelembagaan (Hendar & Kusnadi, 2010), fasilitas gedung permanen sangat penting sebagai pusat aktivitas ekonomi, layanan administrasi, dan simbol keberlanjutan koperasi. Ketidaktersediaan gedung yang memadai berpotensi membatasi akses anggota serta menurunkan kualitas pelayanan.

Indikator kedua mengenai sarana prasarana perkantoran juga menunjukkan kelemahan serupa. Sebanyak **40% responden memberikan skor 0**, menandakan bahwa banyak anggota melihat sarana perkantoran belum memadai. Meskipun terdapat 20% yang memberikan skor 4, dan sisanya memberi skor pada kategori rendah hingga sedang, penilaian ini menunjukkan bahwa fasilitas perkantoran seperti meja kerja, kursi, lemari arsip, atau perangkat pendukung administrasi belum optimal. Ketersediaan sarana kantor sangat terkait dengan efektivitas layanan sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen pelayanan publik, di mana sarana fisik memengaruhi kualitas interaksi antara lembaga dan pengguna layanan (Denhardt, 2011).

Indikator ketiga menunjukkan kondisi yang sedikit lebih baik, yaitu tentang penyediaan tempat penyimpanan dokumen yang terjamin kerahasiaannya. Sebanyak **40% responden memberikan skor 3**, dan **20% memberikan skor 4**, menandakan bahwa sebagian besar anggota menilai adanya sistem penyimpanan dokumen yang relatif baik. Namun terdapat **20% yang memberi skor 1 dan 2**, menunjukkan bahwa tidak semua anggota merasakan konsistensi pengelolaan dokumen tersebut. Dokumen koperasi merupakan aset penting yang mendukung akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola yang benar, sehingga fasilitas yang aman dan sistematis sangat diperlukan (Putnam, 1993).

Indikator mengenai fasilitas gudang memperlihatkan situasi yang serupa dengan ketersediaan gedung, dimana **60% responden memberi skor 0**, menunjukkan bahwa fasilitas gudang belum dianggap memadai dan belum berstatus permanen atau milik koperasi sepenuhnya. Tanpa fasilitas gudang yang layak, koperasi akan sulit mengembangkan fungsi ekonomi seperti penampungan

barang, penyimpanan produk anggota, maupun kebutuhan logistik koperasi. Gudang merupakan infrastruktur penting dalam koperasi serba usaha dan menjadi salah satu indikator kapasitas kelembagaan dalam teori ekonomi mikro kelembagaan (Todaro & Smith, 2015).

Indikator kelima menunjukkan kondisi yang sangat lemah, yakni ketersediaan kendaraan operasional koperasi, di mana **100% responden memberikan skor 0**. Hal ini menggambarkan bahwa koperasi belum memiliki kendaraan yang layak dan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional, seperti pengiriman barang, mobilitas pengurus, kegiatan lapangan, atau koordinasi antar wilayah. Ketiadaan kendaraan operasional secara langsung membatasi efektivitas kegiatan distribusi dan layanan anggota.

Indikator keenam mengenai perangkat digital menunjukkan hasil yang lebih bervariasi. Sebanyak **40% responden memberikan skor 0**, dan **40% memberi skor 1**, sementara hanya **20% yang memberikan skor tertinggi**. Data ini menunjukkan bahwa koperasi masih kekurangan perangkat digital seperti komputer, printer, atau akses internet yang memadai. Dalam era digital, perangkat teknologi merupakan faktor fundamental untuk meningkatkan efisiensi, menyimpan data secara aman, dan mempermudah komunikasi internal maupun eksternal (Davenport & Prusak, 1998). Rendahnya ketersediaan perangkat digital menandakan perlunya strategi modernisasi manajemen koperasi.

Indikator terakhir tentang fasilitas operasional kantor menunjukkan hasil yang cukup beragam namun cenderung lemah. Sebanyak **40% responden memberikan skor 3**, dan **20% memberikan skor 4**, tetapi terdapat juga **20% yang memberi skor 1 dan 2**. Penilaian ini menunjukkan bahwa fasilitas

operasional seperti penyimpanan file, lemari arsip, peralatan administrasi, dan sarana penunjang lainnya telah tersedia, namun kualitas dan jumlahnya belum merata sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan secara optimal.

Secara keseluruhan, Aspek 4 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana KDMP masih merupakan salah satu titik lemah yang memerlukan penguatan signifikan. Koperasi telah menunjukkan upaya dalam menyediakan beberapa fasilitas dasar, seperti tempat dokumen dan sarana operasional sederhana. Namun ketidaktersediaan gedung permanen, fasilitas gudang, kendaraan operasional, dan perangkat digital menunjukkan bahwa KDMP membutuhkan investasi sarana prasarana yang lebih besar agar mampu meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas organisasi. Dalam konteks pengembangan koperasi modern, infrastruktur fisik merupakan fondasi pelayanan berkualitas, sehingga penguatan aspek ini menjadi prioritas strategis untuk mendorong kinerja dan profesionalitas koperasi ke depan.

5. Aspek 5 : Aspek Sumber Daya Manusia

Tabel 11. Hasil Penilaian Aspek 5 Sumber Daya Manusia

	Pernyataan	Indikator				
		0	1	2	3	4
1	Pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih telah memahami tugas dan fungsinya pada koperasi	0%	20%	0%	20%	60%
2	Pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih telah mengikuti pelatihan tentang perkoperasian (yang ditunjukkan dengan sertifikat)	0%	60%	20%	20%	0%
3	Koperasi Desa Merah Putih Telah Menyiapkan dana pelatihan untuk pengurus dan Pengelola (karyawan)	40%	0%	40%	20%	0%
4	Koperasi Desa Merah Putih Telah Menyiapkan dana pembinaan untuk anggota "koperasi, (mitra petani dan UMKM"	40%	0%	40%	20%	0%
5	Koperasi Desa Merah Putih telah terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas perkoperasian yang diadakan oleh Pemerintah daerah	0%	40%	20%	0%	40%

Hasil penilaian Aspek 5 mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, di mana sebagian aspek kapasitas pengurus sudah berada pada level baik, namun aspek pelatihan, pendanaan pengembangan kompetensi, dan keterlibatan koperasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas masih membutuhkan peningkatan yang signifikan. Pada indikator pertama mengenai pemahaman tugas dan fungsi, **60% responden memberikan skor 4**, menunjukkan bahwa mayoritas anggota menilai pengurus dan pengawas memiliki pemahaman yang baik tentang peran mereka dalam koperasi. Sebanyak 20% memberi skor 3 dan 20% memberi skor 1. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa kapasitas dasar dalam menjalankan fungsi struktural telah cukup kuat. Hal ini sejalan dengan teori kapasitas organisasi (Grindle, 1997), yang menekankan bahwa pemahaman peran merupakan fondasi penting dalam efektivitas lembaga.

Namun, indikator kedua mengenai pelatihan perkoperasian menunjukkan hasil sebaliknya. Sebanyak **60% responden memberikan skor 1**, 20% memberi skor 2, dan 20% memberi skor 3—tidak ada yang memberi skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus belum mengikuti pelatihan perkoperasian secara memadai atau tidak memiliki bukti sertifikat pelatihan. Padahal, pelatihan merupakan komponen penting dalam pengembangan kapasitas SDM koperasi sebagaimana dijelaskan dalam prinsip International Cooperative Alliance (ICA), bahwa peningkatan kapasitas pengurus melalui pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan untuk menjaga profesionalitas dan kualitas pengelolaan koperasi. Rendahnya tingkat pelatihan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan kapasitas SDM dan upaya yang dilakukan koperasi.

Indikator ketiga dan keempat, yang masing-masing mengukur ketersediaan dana pelatihan bagi pengurus/karyawan serta dana pembinaan untuk anggota dan mitra, menunjukkan pola penilaian yang hampir sama. Pada kedua indikator ini, **40% responden memberikan skor 0**, 40% memberi skor 2, dan 20% memberikan skor 3. Data ini menegaskan bahwa koperasi belum secara optimal menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan pengurus maupun pembinaan anggota. Padahal, dalam teori pengembangan organisasi (French & Bell, 1999), pengalokasian anggaran untuk pembinaan dianggap sebagai investasi jangka

panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan keberlanjutan organisasi. Tanpa adanya anggaran pelatihan yang memadai, koperasi berpotensi mengalami stagnasi kompetensi, terutama di tengah perubahan lingkungan usaha dan regulasi.

Indikator kelima mengenai keterlibatan koperasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas oleh pemerintah daerah menunjukkan hasil yang lebih bervariasi, dengan **40% responden memberi skor 4**, 40% memberi skor 1, dan 20% memberi skor 2. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian anggota melihat koperasi aktif mengikuti kegiatan pemerintah daerah, namun sebagian lainnya menilai bahwa keterlibatan tersebut belum optimal. Dalam konteks pengembangan koperasi, kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk mendapatkan akses pelatihan, peningkatan kapasitas, pendampingan, dan informasi terbaru mengenai kebijakan perkoperasian (Todaro & Smith, 2015). Variasi penilaian ini dapat mengindikasikan adanya kurangnya komunikasi internal atau perbedaan pengalaman anggota dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.

Secara keseluruhan, Aspek 5 menunjukkan bahwa SDM KDMP memiliki pemahaman dasar yang baik terkait tugas dan fungsi kepengurusan, namun masih lemah pada aspek pengembangan kapasitas melalui pelatihan serta penyediaan anggaran untuk peningkatan kompetensi. Kondisi ini menggambarkan bahwa koperasi memiliki potensi sumber daya manusia yang baik, tetapi belum difasilitasi dengan sistem pembinaan dan pelatihan yang memadai. Jika koperasi ingin meningkatkan profesionalisme, efektivitas layanan, dan daya saing, diperlukan strategi penguatan SDM yang lebih terstruktur, seperti penyusunan rencana pelatihan tahunan, alokasi anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan pengurus dan anggota selalu mendapatkan pembaruan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, SDM KDMP dapat berkembang menjadi lebih kompeten, profesional, dan mampu mengelola koperasi dengan standar modern yang lebih baik.

6. Aspek 6 : Aspek Hasil (KDMP)

Tabel 12. Hasil Penilaian Aspek 6 Hasil (Dampak) KDMP

	Pernyataan	Indikator				
		0	1	2	3	4
1	Peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat (sudah membagikan SHU)	100%	0%	0%	0%	0%
2	Peningkatan volume, dan jenis usaha Koperasi Desa Merah Putih	20%	20%	0%	60%	0%
3	Peningkatan pendapatan koperasi Desa Merah Putih	20%	20%	0%	60%	0%
4	Peningkatan daya serap hasil produk pertanian Petani dan UMKM	20%	20%	40%	20%	0%
5	Peningkatan akses pasar bagi anggota dan mitra binaan (produk Petani dan UMKM)	20%	60%	0%	20%	0%
6	Penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja (adanya jumlah staf KDMP)	20%	40%	20%	0%	20%
7	Adanya peningkatan inovasi bisnis dan layanan koperasi	0%	20%	0%	60%	20%

Hasil penilaian pada Aspek Hasil (Dampak) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan kondisi yang beragam dan mencerminkan dinamika perkembangan koperasi yang masih berada pada tahap pertumbuhan. Berdasarkan data, seluruh responden (100%) menilai bahwa peningkatan kesejahteraan anggota melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) belum dirasakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa KDMP belum mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi para anggota. Dalam teori perkoperasian, SHU merupakan indikator nyata dari keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, karena SHU mencerminkan profitabilitas usaha kolektif (Hendar, 2010). Ketiadaan distribusi SHU pada fase ini menunjukkan bahwa koperasi masih berfokus pada stabilisasi usaha, investasi awal, serta upaya memperbesar kapasitas bisnis. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Cook dan Chaddad (2004) yang menyatakan bahwa koperasi pada fase early development umumnya belum dapat memaksimalkan manfaat ekonomi langsung sebelum struktur usaha mencapai titik stabil.

Sementara itu, indikator peningkatan volume dan jenis usaha menunjukkan perkembangan lebih positif. Sebanyak 60% responden memberikan skor tinggi, menandakan bahwa KDMP telah memperluas atau menambah jenis layanan bisnisnya. Hal ini penting karena diversifikasi usaha dapat meningkatkan ketahanan koperasi terhadap fluktuasi pasar dan membuka ruang nilai tambah yang lebih besar (Soetrisno, 2012). Kecenderungan serupa juga terlihat pada indikator peningkatan pendapatan koperasi, di mana 60% responden menilai pendapatan KDMP mengalami peningkatan. Secara teori, pertumbuhan

pendapatan koperasi terkait dengan efektivitas model bisnis, kekuatan jaringan kemitraan, dan kemampuan koperasi dalam mengelola rantai pasok (Bijman et al., 2012). Meski demikian, masih terdapat proporsi responden yang menilai rendah pada dua indikator ini, yang dapat mengindikasikan ketidakterlibatan sebagian anggota dalam program usaha baru atau belum meratanya informasi dan dampak peningkatan usaha.

Pada aspek penyerapan hasil produk pertanian dan UMKM, persepsi responden cukup bervariasi, dengan kecenderungan terbesar pada kategori sedang (40%). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun KDMP berperan dalam menyerap sebagian produk lokal, kapasitas tersebut belum optimal. Menurut Markelova dan Meinzen-Dick (2009), koperasi seharusnya berperan sebagai lembaga penghubung antara produsen kecil dengan pasar, sehingga kemampuan menyerap dan menyalurkan produk lokal menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi. Variasi persepsi responden ini dapat menandakan bahwa skema penyerapan hasil belum dilakukan secara terstruktur atau belum konsisten dirasakan oleh seluruh kelompok petani dan UMKM binaan.

Lebih lanjut, peningkatan akses pasar bagi anggota dan mitra menunjukkan skor relatif rendah, dengan 60% responden menilai pada kategori 1. Hal ini mengindikasikan bahwa KDMP masih menghadapi tantangan dalam memperluas pasar atau membuka peluang baru bagi produk anggotanya. Secara teori, penguatan akses pasar merupakan komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal, karena pasar yang luas menentukan kelangsungan usaha kecil dan menengah (Ortmann & King, 2007). Rendahnya persepsi pada indikator ini menunjukkan perlunya strategi pemasaran yang lebih agresif, seperti pengembangan branding, perluasan jaringan distribusi, atau pemanfaatan platform digital.

Indikator penciptaan lapangan kerja menunjukkan distribusi skor yang merata, mencerminkan persepsi yang terfragmentasi mengenai sejauh mana KDMP berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Birchall (2003) menyatakan bahwa koperasi dapat menciptakan lapangan kerja melalui pertumbuhan unit usaha dan ekspansi layanan; namun, hal ini biasanya terjadi ketika koperasi telah mencapai skala bisnis yang lebih besar. Kondisi KDMP yang masih berkembang

menjelaskan mengapa sebagian responden menilai kontribusi terhadap lapangan kerja masih terbatas.

Berbeda dengan indikator lain, peningkatan inovasi bisnis dan layanan mendapatkan penilaian paling positif, di mana 60% responden memberikan skor tinggi dan 20% memberikan skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa KDMP dinilai adaptif dan terus mengembangkan pendekatan baru dalam layanan maupun model bisnisnya. Inovasi merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi, terutama dalam lingkungan ekonomi yang berubah cepat (Schumpeter, 1934). Temuan ini menjadi modal penting bagi KDMP, karena inovasi dapat menjadi fondasi untuk memperbaiki indikator lain yang masih lemah, seperti akses pasar dan penyerapan produk.

Secara keseluruhan, hasil penilaian Aspek Hasil menunjukkan bahwa KDMP telah menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi inovasi, peningkatan jenis usaha, dan pertumbuhan pendapatan. Namun, dampak ekonomi langsung bagi anggota seperti peningkatan kesejahteraan, akses pasar, dan penyerapan produk masih belum optimal. Kondisi ini menggambarkan koperasi yang berada pada fase pertumbuhan dengan potensi besar untuk berkembang lebih jauh melalui penguatan strategi pemasaran, diversifikasi usaha, penguatan jaringan kemitraan, serta peningkatan kapasitas manajemen usaha.

3.1.2 Dapur Umum (MBG)

1. Tabel Reduksi Data

a. Dapur Umum Jatirembe

Tabel 13.Tabel Reduksi Dapur Umum Jatirembe

FOKUS	DATA MENTAH (RINGKAS)	REDUKSI (INTI INFORMASI)
Kelembagaan & Tantangan	SDM hanya lulusan SD sehingga sulit memenuhi standar	Keterbatasan kompetensi SDM
Pengadaan Bahan Baku	Awal sulit, kini stabil kecuali buah & susu	Kendala spesifik bahan segar
Koordinasi	Koordinasi terutama dengan BUMDes	Kemitraan terbatas
Pemasok	Pasar & Sekdes (beras)	Pemasok lokal
Syarat Pemasok	Sistem pembayaran langsung	Mekanisme pembayaran jelas
Rantai Pasok	Beli ke pasar → masak → distribusi	Sistem rantai pasok sederhana
Perencanaan Menu	Ahli gizi & asisten lapangan	SDM kunci menu tersedia

FOKUS	DATA MENTAH (RINGKAS)	REDUKSI (INTI INFORMASI)
Produksi	3.594 porsi/hari	Kapasitas cukup besar
Sarana Prasarana	Semua tersedia, tidak butuh tambahan	Sarpras memadai
Kolaborasi KDMP	Setuju jika dibantu bahan baku	Sikap positif
Siap Bersinergi	Siap jika syarat terpenuhi	Kesiapan bersyarat
Kebutuhan Sinkronisasi	Kebutuhan pokok	Fokus bahan baku
Potensi Kontribusi	Membantu buka jalur bisnis KDMP	Peluang bisnis
Penguatan Kelembagaan	Konsistensi produk, harga, kualitas	Penguatan manajemen mutu

b. Dapur Umum Kedamaian

Tabel 14. Reduksi Dapur Umum Kedamaian

Fokus	Data Mentah (Ringkas)	Reduksi (Inti Informasi)
Kelembagaan & Tantangan	Relawan tidak terbiasa; banyak pingsan; masalah accounting; dana BGN cair lama	Tantangan SDM & administrasi
Pengadaan Bahan Baku	Awal sulit karena pola kerja belum terbentuk	Adaptasi awal rantai pasok
Koordinasi	Koordinasi dengan BUMDes	Kemitraan desa
Pemasok	BUMDes, toko lokal, toko buah Surabaya	Pemasok beragam
Syarat Pemasok	Harus lewat supplier penampung	Sistem tertutup pemasok
Rantai Pasok	Supplier → produksi → distribusi	Sistem rantai pasok terstruktur
Perencanaan Menu	Chef & ahli gizi → koordinasi KSPG → driver	Rantai kerja lengkap
Produksi	Kapasitas 5.000 porsi, real 3.000	Kapasitas tinggi
Sarana Prasarana	Banyak alat; masih butuh peralatan tambahan	Sarpras cukup namun berkembang
Kolaborasi KDMP	Bisa, tapi harus melalui supplier penampung	Kolaborasi dibatasi regulasi internal
Kontribusi Ekonomi Kerakyatan	Merekrut warga 50 orang, gaji harian, limbah untuk peternak	Dampak sosial-ekonomi besar
Penguatan Kelembagaan	Kesiapan KDMP	Butuh kesiapan mitra

3. Perbandingan Dua Dapur

Tabel 15. Tabel Penyajian Data 2 Dapur Umum

TEMA	JATIREMBE	KEDAMAIAN
SDM & Tantangan	SDM rendah pendidikan	SDM kelelahan, relawan pingsan, administrasi lemah
Pengadaan Bahan Baku	Stabil kecuali buah & susu	Awal sulit karena adaptasi

TEMA	JATIREMBE	KEDAMAIAN
Pemasok	Pasar & Sekdes	Supplier penampung, BUMDes, toko buah
Koordinasi	BUMDes	BUMDes
Rantai Pasok	Sederhana: pasar → dapur	Lebih sistematis: supplier → dapur
Kapasitas Produksi	3.594 porsi/hari	3.000 dari kapasitas 5.000
Sarana Prasarana	Memadai	Memadai tetapi butuh tambahan
Kolaborasi dengan KDMP	Sangat siap, butuh bahan baku	Bisa tapi via supplier penampung
Kontribusi Ekonomi	Membuka jalur bisnis KDMP	Dampak sosial besar: gaji warga, serap alumni UMG
Penguatan	Mutu, konsistensi	Kesiapan KDMP

4. Penarikan Tema

Tabel 16. Penarikan Tema

TEMA UTAMA	MAKNA DARI 2 DAPUR UMUM
Tantangan SDM	Kedua dapur menghadapi masalah kemampuan SDM, namun dengan bentuk berbeda (pendidikan rendah vs stamina & administrasi).
Pengadaan dan Rantai Pasok	Jatirembe lebih sederhana dan lokal; Kedamaian lebih terstruktur dan bergantung supplier penampung.
Kapasitas Operasional	Keduanya memiliki kapasitas besar (>3.000 porsi/hari).
Kesiapan Kolaborasi KDMP	Jatirembe lebih fleksibel; Kedamaian mensyaratkan integrasi dengan supplier penampung.
Kelembagaan & Penguatan	Penguatan manajemen mutu dan tata kelola menjadi kebutuhan utama.
Dampak Ekonomi Kerakyatan	Kedamaian menunjukkan kontribusi lebih besar pada pemberdayaan warga (50 pekerja lokal).
Sarpras Memadai	Keduanya cukup siap secara fasilitas untuk mendukung kolaborasi.

Penelitian ini menggambarkan secara mendalam dinamika operasional dua dapur umum, yaitu Dapur Umum Jatirembe dan Dapur Umum Kedamaian, serta potensi sinkronisasi keduanya dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Berdasarkan hasil wawancara dan analisis menggunakan pendekatan Miles & Huberman, diperoleh gambaran utuh mengenai tantangan kelembagaan, rantai pasok, kapasitas produksi, koordinasi kemitraan, hingga kesiapan dalam berkolaborasi dalam kerangka ekonomi kerakyatan.

Dapur Umum Jatirembe menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi berada pada aspek sumber daya manusia. Sebagian besar SDM yang terlibat hanya berpendidikan SD atau SMA, sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi standar operasional dan manajemen dapur skala besar masih terbatas. Keterbatasan ini memengaruhi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas sehari-hari. Meskipun demikian, dapur ini dapat beroperasi secara stabil dari sisi pengadaan bahan baku, walaupun masih terdapat kendala pada beberapa bahan segar seperti buah dan susu. Sistem pengadaan bahan baku dilakukan secara langsung melalui pasar dan Sekdes untuk kebutuhan beras, sehingga pola pengadaan yang dibangun bersifat sederhana namun fleksibel.

Sementara itu, Dapur Umum Kedamaian menghadapi tantangan operasional yang berbeda. Latar belakang pekerjaan para relawan yang sebagian besar bekerja di sawah menyebabkan ritme kerja di dapur umum terasa berat bagi mereka, hingga beberapa mengalami kelelahan bahkan pingsan. Selain tantangan fisik, terdapat pula hambatan pada aspek administrasi, terutama pada fungsi accounting dan ahli gizi yang masih belum terbiasa menangani kegiatan skala besar. Masalah semakin kompleks karena pencairan dana dari BGN membutuhkan waktu hampir satu bulan, sementara operasional dapur tetap berjalan dan membutuhkan biaya tetap seperti listrik, sewa, dan logistik harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan Kedamaian lebih banyak berasal dari aspek kelembagaan internal.

Dari sisi rantai pasok, kedua dapur menunjukkan pola yang berbeda. Jatirembe memiliki sistem pengadaan bahan baku yang lebih spontan, langsung, dan berbasis kedekatan sosial dengan pemasok lokal. Kondisi ini membuat dapur

lebih fleksibel namun kadang menawarkan ketidakpastian pasokan. Berbeda dengan itu, Kedamaian memiliki sistem pengadaan yang lebih terstruktur melalui supplier penampung, BUMDes, toko mitra, hingga pemasok buah dari Surabaya. Sistem ini memberikan stabilitas pasokan namun membatasi fleksibilitas dalam memilih pemasok baru karena harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Kapasitas produksi kedua dapur juga berbeda dalam konteks kesiapan operasional. Jatirembe memproduksi sekitar 3.594 porsi makanan per hari dan menilai bahwa sarana prasarana yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan operasional. Sementara Kedamaian memiliki kapasitas dapur hingga 5.000 porsi per hari, meskipun saat ini baru digunakan sekitar 3.000 porsi. Sarana prasarana dapur di Kedamaian cukup lengkap, namun masih membutuhkan beberapa peralatan tambahan untuk meningkatkan efisiensi produksi, seperti pengering ompreng dan peralatan pemotong.

Dalam hal kemitraan, kedua dapur memiliki pola koordinasi yang serupa, yaitu sama-sama menjalin hubungan utama dengan BUMDes. Namun pola kerja sama pemasok berbeda, di mana Jatirembe lebih terbuka dan longgar dalam memilih pemasok, sedangkan Kedamaian harus mengikuti mekanisme supplier penampung yang telah ditentukan. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam memperkirakan potensi kolaborasi dengan KDMP.

Kedua dapur umum pada prinsipnya menyambut positif rencana sinkronisasi dengan KDMP, namun tingkat kesiapan dan mekanisme integrasinya berbeda. Jatirembe terlihat lebih fleksibel dan menerima dengan baik jika KDMP masuk sebagai pemasok bahan baku secara langsung. Dapur ini bahkan melihat peluang terbuka untuk membuka jalur bisnis baru yang dapat menguntungkan

KDMP. Sebaliknya, Kedamaian memberikan persetujuan yang bersyarat. Dapur ini hanya dapat menerima KDMP jika pengadaan bahan melalui supplier penampung tetap menjadi mekanisme utama. Kualitas, harga, dan konsistensi pasokan menjadi faktor penentu sebelum kolaborasi dapat terjalin. KDMP kemungkinan akan lebih tepat berperan sebagai penghubung atau makelar dalam skema ini.

Dari perspektif ekonomi kerakyatan, kontribusi kedua dapur memiliki tingkat yang berbeda. Dapur Umum Kedamaian menunjukkan dampak sosial ekonomi yang jauh lebih kuat. Dapur ini telah merekrut sekitar 50 warga sekitar sebagai pekerja dengan sistem gaji harian antara Rp115.000–130.000. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga memberikan peluang peningkatan pendapatan keluarga secara langsung. Selain itu, limbah dapur dimanfaatkan oleh peternak lokal, sehingga kontribusi dapur meluas pada sektor ekonomi lokal lainnya. Keterlibatan lulusan UMG sebagai ahli gizi menunjukkan adanya integrasi dengan institusi pendidikan dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM lokal. Sebaliknya, Jatirembe memiliki potensi ekonomi, terutama dalam hal membuka jalur bisnis baru, namun belum menunjukkan dampak pemberdayaan masyarakat yang signifikan seperti Kedamaian.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kedua dapur umum memiliki kapasitas dan potensi besar untuk bersinergi dengan KDMP, namun strategi integrasi harus menyesuaikan karakteristik masing-masing dapur. Jatirembe yang bersifat lebih fleksibel memungkinkan kolaborasi secara langsung, sedangkan Kedamaian membutuhkan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan bertingkat. Penguatan kelembagaan pada kedua dapur mutlak

diperlukan, khususnya pada aspek sumber daya manusia, manajemen mutu, tata kelola keuangan, dan integrasi rantai pasok. Dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi yang terbangun antara KDMP dan kedua dapur umum dapat menciptakan ekosistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung ekonomi kerakyatan secara nyata.

3.1.3 Hasil Perbandingan Aspek Kelembagaan KDMP

No	Aspek	KDMP 1	KDMP 2	KDMP 3	KDMP 4	KDMP 5	Mean
1	Aspek 1	2	3,1	3,1	2,9	2,6	2,7
2	Aspek 2	1,9	3,8	3,8	3,4	4	3,4
3	Aspek 3	3,3	3,9	3,9	4	3,6	3,7
4	Aspek 4	1,4	0,9	0,9	0,6	3,4	1,4
5	Aspek 5	1,6	2,6	2,6	0,8	2,4	2
6	Aspek 6	2,3	2	1,9	0,1	1,7	1,6
Mean		2,1	2,7	2,7	2	3	2,5

Berdasarkan hasil kompilasi data kuantitatif terhadap enam aspek kelembagaan pada lima Kelompok Dosen Mata Pelajaran (KDMP), diperoleh gambaran bahwa setiap KDMP menunjukkan variasi tingkat pencapaian yang mencerminkan perbedaan kapasitas kelembagaan, efektivitas tata kelola, serta konsistensi implementasi standar mutu. Secara umum, nilai rerata keseluruhan menunjukkan bahwa KDMP 5 memiliki performa paling tinggi dengan skor rata-rata 3,0, disusul KDMP 2 dan KDMP 3 yang sama-sama mencapai skor rata-rata 2,7. Sementara itu, KDMP 1 dan KDMP 4 menempati posisi lebih rendah dengan rerata masing-masing 2,1 dan 2,0.

Pada Aspel 1, hasil perbandingan menunjukkan pola yang relatif moderat di semua KDMP, dengan rentang skor antara 2,6 hingga 3,1. KDMP 2 dan KDMP 3 memperoleh skor tertinggi (3,1), yang mengindikasikan bahwa kedua kelompok ini memiliki tingkat pemenuhan standar awal yang lebih stabil dibandingkan

KDMP lainnya. Sebaliknya, KDMP 4 mencatat nilai terendah (2,6), mencerminkan perlunya optimalisasi pada aspek fundamental kelembagaan.Aspek 2 memperlihatkan perbedaan yang lebih mencolok. KDMP 5 menempati posisi tertinggi (4,0), menunjukkan kesiapan struktur, tata kelola, atau proses yang sangat baik pada aspek ini. KDMP 1 justru berada pada posisi terendah dengan skor 1,9, menandakan adanya kesenjangan signifikan yang memerlukan perbaikan sistematis.

Pada Aspek 3, seluruh KDMP memperoleh nilai relatif tinggi, berada pada rentang 3,3 hingga 4,0. KDMP 4 menjadi kelompok dengan capaian terbaik (4,0), sedangkan KDMP 1 kembali menempati skor terendah (3,3). Tingginya skor pada aspek ini menunjukkan bahwa sebagian besar KDMP memiliki kekuatan dalam pemenuhan standar prosedural atau substansial yang diukur pada kategori ketiga.

Kontras terlihat pada Aspek 4, yang menunjukkan variasi ekstrem. KDMP 5 memperoleh skor sangat tinggi (3,4), jauh meninggalkan KDMP lainnya yang hanya berada pada rentang 0,6 hingga 1,4. Hal ini menunjukkan bahwa KDMP 5 memiliki kapasitas kelembagaan yang jauh lebih matang dalam standar ini, sementara KDMP 4 dengan skor 0,6 menunjukkan kebutuhan intervensi yang sangat signifikan untuk pengembangan tata kelola di aspek terkait.Pada Aspek 5, skor tertinggi diperoleh oleh KDMP 2 dan KDMP 3 (2,6), yang menunjukkan performa moderat. KDMP 4 kembali menjadi kelompok dengan nilai terendah (0,8), mengindikasikan belum optimalnya implementasi standar yang berkaitan dengan aspek kelima. Sementara itu, KDMP 1 dan KDMP 5 berada pada kategori menengah dengan skor masing-masing 1,6 dan 2,4.

Terakhir, Aspek 6 menunjukkan bahwa KDMP 1 memiliki performa terbaik (2,3), sementara KDMP 4 kembali memperoleh skor terendah (0,1). Nilai rendah pada KDMP 4 di beberapa standar konsisten menunjukkan adanya tantangan sistemik dalam pencapaian mutu kelembagaan yang memerlukan intervensi struktural.Secara keseluruhan, hasil perbandingan enam aspek pada lima KDMP memberikan gambaran bahwa kekuatan kelembagaan masih belum merata. KDMP 5 secara konsisten menunjukkan capaian tertinggi, mencerminkan stabilitas tata kelola dan implementasi standar mutu yang lebih baik. KDMP 2 dan KDMP 3 juga menunjukkan performa yang relatif seimbang. Sementara itu, KDMP 4 menempati posisi terendah pada sebagian besar aspek, sehingga perlu menjadi prioritas pendampingan dan penguatan. Temuan ini memberikan dasar penting bagi penyusunan strategi peningkatan mutu kelembagaan yang lebih terarah dan berbasis bukti.

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Tabel Kesimpulan & Peta Sinkronisasi KDMP – Dapur Umum (MBG)

Tabel 18. Kesimpulan & Peta Sinkronisasi KDMP-Dapur Umum

Aspek	Temuan Utama	Indikasi Penguatan / Permasalahan
Legalitas & Struktur Organisasi	KDMP memiliki AD/ART, visi–misi, dokumen struktur, SOP, dan dokumen kelembagaan lengkap.	Fondasi kelembagaan kuat dan sesuai regulasi.
Mekanisme Pengambilan Keputusan	SOP dipahami dan dijalankan; koordinasi berjalan cukup baik.	Sosialisasi keputusan belum merata, implementasi SOP antarunit bervariasi.
Manajemen & Akuntabilitas	Evaluasi rutin berjalan; inovasi layanan dinilai tinggi oleh responden.	SHU belum dibagikan, laporan keuangan belum optimal, sarpras sangat terbatas.
Sarana & Prasarana	Minim sarpras: gedung sementara, tanpa gudang, tanpa kendaraan operasional.	Menghambat fungsi distribusi, pemasaran, dan logistik.
SDM & Kompetensi	Pengurus memahami tugasnya.	Minim pelatihan bersertifikat, tidak ada dana khusus pengembangan SDM.
Dampak Ekonomi	Peningkatan jenis usaha dan pendapatan menurut sebagian responden.	Akses pasar & penyerapan produk belum optimal; manfaat ekonomi belum merata.

4.2 Peta Sinkronisasi Model Bisnis KDMP dengan Dapur Umum

Tabel 19. Peta Sinkronisasi Model Bisnis KDMP dengan Dapur Umum

Komponen	Dapur Jatirembe	Dapur Kedamaian	Implikasi Sinkronisasi
Rantai Pasok	Pasokan langsung dari pasar lokal; fleksibel menerima pemasok.	Pasokan melalui **supplier penampung/BUMDes**; rantai lebih terstruktur.	KDMP → Jatirembe = **direct supply**; KDMP → Kedamaian = **via penampung/aggregator**.

Komponen	Dapur Jatirembe	Dapur Kedamaian	Implikasi Sinkronisasi
Kapasitas Produksi	± **3.594 porsi/hari**.	Real 3.000 porsi (kapasitas 5.000).	Kebutuhan pasokan besar, peluang penyerapan produk KDMP tinggi.
Kesiapan Kolaborasi	Tinggi: siap berkolaborasi selama bahan baku stabil.	Terikat mekanisme penampung; butuh verifikasi & standarisasi.	KDMP perlu MoU, standardisasi mutu, dan kontinuitas pasokan.
Peran SDM Lokal	Menggunakan tenaga lokal desa.	Mempekerjakan ± **50 tenaga lokal**, dampak sosial besar.	Kolaborasi memperkuat ekonomi lokal & lapangan kerja.
Potensi Sinergi	Bahan pangan segar, produk olahan, distribusi cepat.	Produk dengan standar mutu lebih tinggi, logistik terjadwal.	KDMP butuh gudang, kendaraan, dan QC sederhana.
Integrasi Program	MoU pasokan harian/mingguan.	Perlu integrasi dengan BUMDes dan penampung.	Dua model integrasi: direct & aggregator.

4.3 Rekomendasi Kebijakan Strategis

Tabel 20. Rekomendasi Kebijakan Strategis

Bidang Kebijakan	Rekomendasi Strategis	Tujuan	Alasan/Dasar Empiris	Aktor Pelaksana	Output yang Diharapkan
Penguatan Kelembagaan	Matching Grant Sarpras (gudang, kendaraan operasional, perangkat digital)	Memperkuat fungsi logistik & distribusi KDMP	KDMP tidak memiliki gudang & kendaraan; sangat membatasi akses pasar & pasokan	Pemkab Gresik, Dinas Koperasi	Gudang koperasi, 1 unit kendaraan, sistem inventori digital
	MoU Standardisasi KDMP–Dapur–BUMDes/Penampung	Menetapkan pola kerja dan alur pasok baku	Dapur Kedamaian wajib melalui penampung; Jatirembe siap direct supply	Dinas Ketahanan Pangan, BUMDes, KDMP	Dokumen MoU, SOP rantai pasok
	Pendampingan Manajemen & Laporan Keuangan	Meningkatkan akuntabilitas & tata kelola	Laporan keuangan belum optimal; SHU belum dibagikan	Dinas Koperasi, Perguruan Tinggi	Laporan keuangan standar koperasi
Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan Perkoperasian & Rantai Pasok Pangan	Meningkatkan kompetensi pengurus	SDM belum memiliki pelatihan bersertifikat	Dinas Koperasi, LSP, Perguruan Tinggi	Sertifikat pelatihan, SOP QC pangan
	Pelatihan	Memenuhi	Dapur	Dinkes, UMG,	Sertifikasi

Bidang Kebijakan	Rekomendasi Strategis	Tujuan	Alasan/Dasar Empiris	Aktor Pelaksana	Output yang Diharapkan
	HACCP/Food Safety	standar pemasok dapur	memerlukan standar mutu bahan baku	Dinas Ketahanan Pangan	keamanan pangan
	Magang/Mentoring Mahasiswa UMG	Menambah kapasitas teknis biaya rendah	Dapur & KDMP terbukti didukung alumni UMG	UMG, Pemda	Mahasiswa magang di dapur/KDMP
Kolaborasi Koperasi – Dapur Umum	Skema Pengadaan Lokal Pro-Rakyat	Memberi akses pasar tetap bagi KDMP	KDMP butuh pasar stabil untuk produk anggota	Pemkab, Dinas Ketahanan Pangan	KDMP menjadi pemasok program pangan lokal
	Unit Aggregator KDMP–BUMDes	Menstandarkan kualitas & menampung produksi	Dapur Kedamaian butuh pemasok terverifikasi/penampung	BUMDes, KDMP	Unit agregasi desa berjalan
	Pilot Project Integrasi Pasokan	Menguji pola direct supply & aggregator	Perbedaan model rantai pasok dua dapur	Pemkab, KDMP, Dapur	Pilot berfungsi, SOP siap replikasi
Pendanaan & Insentif	KUR Mikro untuk Anggota KDMP	Meningkatkan kapasitas produksi anggota	Anggota butuh modal untuk memenuhi volume dapur	Bank Himbara, Pemkab	Akses pembiayaan lancar
	Subsidi Sertifikasi Mutu/Safe Food	Memenuhi standar pasar besar	Dapur ingin kualitas & keamanan pangan konsisten	Pemkab, Dinas Kesehatan	Produk KDMP tersertifikasi
Monitoring & Evaluasi	Sistem M&E 6 indikator	Memantau keberhasilan kolaborasi	Dibutuhkan untuk kontrol program	Pemkab & Dinas terkait	Dashboard M&E rantai pasok

DAFTAR PUSTAKA

Behn, R. (2003). *Why Measure Performance?*. Public Administration Review.

Bush, T. (2018). *Theories of Educational Leadership and Management*.

Cohen, E. (2007). *Organizational Effectiveness and Decision-Making*.

Harvey, L., & Green, D. (1993). *Defining Quality*. Assessment & Evaluation in Higher Education.

Hoy, W. & Miskel, C. (2013). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*.

Robbins, S. (2016). *Organizational Behavior*.

Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education*.

UNESCO (2017). *Education Governance Review*.

Chaves, R., & Sajardo, A. (2004). Social Economy and the Cooperative Movement. Annals of Public and Cooperative Economics.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business Press.

Denhardt, R. B. (2011). The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe.

French, W. L., & Bell, C. H. (1999). Organization Development: Behavioral Science Interventions for Organization Improvement. Prentice Hall.

Grindle, M. (1997). Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries. Harvard University Press.

Heizer, J., & Render, B. (2014). Operations Management. Pearson Education.

Hendar, & Kusnadi. (2010). Koperasi dan UMKM. Lembaga Penerbit FE UI.

International Cooperative Alliance (ICA). (2018). Cooperative Principles and Values. ICA Publications.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. Pearson Education.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior. Pearson Education.

Smith, S. C. (2014). Ending Global Poverty: A Guide to What Works. Palgrave Macmillan.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Pearson.

Zeithaml, V., Bitner, M., & Gremler, D. (2018). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. McGraw-Hill Education.

Peraturan dan Dokumen Pemerintah Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2019). Pedoman Pembinaan Perkoperasian. Jakarta: Kemenkop UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). Standar Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi.